

**STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI
KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
FATIMAH DWIDININGSIH
NIM: 105190183**

**Pembimbing:
Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si
Devrian Ali Putra, S.S.I, MA.Hk**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2023



Fatimah Dwdiningsih
NIM. 105190183



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Telp. (0741)582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : “Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 07 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:



Dr. H. Kholil, S.Ag., M.H

NIP. 201022000031005

Panitia Ujian :
Ketua Sidang

: Wenny Dastina, M.Si
NIP. 197801092005012006

(.....)

Sekretaris Sidang

: Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001

(.....)

Penguji I

: Dr. H. Kholil Syuaib, M.Ag
NIP. 197207032007101000

(.....)

Penguji II

: Eza Tri Yandi, S.H., M.H
NIP. 199401012020121022

(.....)

Pembimbing I

: Dr. Irmawati Sagala, S.I.P., M.Si
NIP. 198010012009092009

(.....)

Pembimbing II

: Devrian Ali Putra, S.Si., MA.Hk
NIP. 198809112018011001

(.....)

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!"

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." (Q.S Al-Baqarah : 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kulangkahkan kaki saya menuju kesuksesan, benturan demi benturan terus saya lalui untuk meraih cita-cita yang saya impikan. Dengan rasa syukur dan kehadiran Allah SWT kupersembahkan skripsi ini untuk ibu dan ayah yang sangat aku cintai terimakasih atas do'a-do'a dan semangat yang kalian berikan untukku, terimakasih tak terhingga untuk setiap tetes keringat dalam membesarkanku yang tak akan pernah sanggup ku balas dengan perbuatan. Serta abangku Darma Safutra yang aku sayangi dan yang selalu memberi semangat, semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta umur panjang, Aamiin.

ABSTRAK

Nama : Fatimah Dwidiningsih
NIM : 105190183
Judul : Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Skripsi ini bertujuan untuk melihat strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari, bagaimana kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari serta tantangan dan peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan pembangunan dan strategi pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari yaitu menambah anggaran melalui pinjaman daerah, membatasi mobil angkutan yang melebihi tonase, membuat aplikasi pengaduan, dan menentukan skala prioritas. Tantangan perbaikan jalan adalah keterbatasan anggaran, cuaca yang tidak menentu, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Adapun peluangnya yaitu bekerjasama dengan pihak swasta, bekerjasama dengan pihak BMKG, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan jalan.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Perbaikan Infrastruktur Jalan, Strategi Pemeliharaan Fasilitas Umum

ABSTRACT

Nama : Fatimah Dwidiningsih
NIM : 105190183
Judul : Strategy of Public Works and Spatial Planning Service in Road Infrastructure Improvement in Batanghari Regency

This thesis aims to look at the strategy of the Public Works and Spatial Planning Office of Batanghari Regency in improving road Infrastructure in Batanghari Regency, how are the condition of road infrastructure in Batanghari Regency and the challenges and opportunities of the Office of Public Works and Spatial Planning in improving road infrastructure in Batanghari Regency. This study uses a qualitative method with an empirical social approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study uses the theory of development planning and development strategy. Based on the results of the research, it was found that the strategy of the Public Works and Spatial Planning Office in improving road infrastructure in Batanghari Regency, namely increasing the budget through regional loans, limiting transport cars that exceed the tonnage, making complaint applications, and determining priority scales. Challenges road repairs are budget constraints, unpredictable weather, and a lack of public awareness. The opportunities include working with the private sector, working with the BMKG, and outreach to the public regarding the importance of road maintenance.

Keywords : Public service, Road infrastruktur repair, Public facility maintenance strategy

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas karunia, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan mengucapkan *AllahummaShalli'ala Muhammad Wa'alaalihinSyaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang yakni "*Minadzulumati ilan Nur*" seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun judul skripsi ini yaitu "**Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**".

Kemudian penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi penulis dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, yakni kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA., M.IR, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum dan Ibu Wenny Destina, S.Sos., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Devrian Ali Putra, S.S.I., M.Ahk selaku Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan Pihak Perpustakaan UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Semoga apa yang diberikan tercatat sebagai amal jariyah disisi Allah SWT, dan mendapat pahala atau ganjaran yang sepantasnya.

Jambi, Agustus 2023
Penulis

Fatimah Dwidiningsih
NIM:1051901833

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	17
A. Perencanaan Pembangunan	17
1. Pengertian dan Tujuan Perencanaan Pembangunan.....	17
2. Tahapan Perencanaan Pembangunan	22
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan	24
B. Strategi Pembangunan.....	26

1. Pengertian Strategi Pembangunan.....	26
2. Macam-macam Strategi Pembangunan Indonesia	29
3. Tahapan Penyusunan Strategi.....	30
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	32
A. Kabupaten Batanghari.....	32
1. Letak Geografis.....	32
2. Demografi	33
3. Kondisi Infrastruktur Jalan.....	33
B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari .	34
1. Sejarah.....	34
2. Struktur Organisasi	35
3. Visi Misi.....	41
BAB IV :STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	
RUANG KABUPATEN BATANGHARI DALAM PERBAIKAN	
INFRASTRUKTUR JALAN.....	43
A. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan infrastruktur Jalan di kabupaten Batanghari.....	43
B. Tantangan dan Peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di kabupaten Batanghari.....	73

BAB V : PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Panjang Jalan Berdasarkan Jenisnya.....	4
Tabel 2 : Data Informan Penelitian	15
Tabel 3 : Banyaknya Penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin	33
Tabel 4 : Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Batanghari.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Wilayah Kabupaten Batanghari	32
Gambar 2 : Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Batanghari.....	35
Gambar 3 : Penetapan Jalan Kabupaten dalam Kabupaten Batanghari	55
Gambar 4 : Anggaran Perbaikan Jalan Kabupaten Batanghari Tahun 2022 .	56
Gambar 5 : Kondisi Jalan Kabupaten di Desa Kubu Kandang	57
Gambar 6 : Kondisi Jalan Kabupaten di Desa Kuap.....	57
Gambar 7 : Kondisi Jalan Kabupaten di Desa Senaning.....	58
Gambar 8 : Kondisi Jalan Kabupaten di Desa Lubuk Ruso.....	59
Gambar 9 : Tampilan Awal Aplikasi Terus Terang.....	66
Gambar 10 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR	70

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
DAK	: Dana Alokasi Khusus
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
IPR	: Izin Pemanfaatan Ruang
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SDM	: Sumber Daya Manusia
BMKG	: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangun Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana pada penjelasan umum UUD 1945 disebutkan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan kesejahteraan umum diwujudkan melalui program pembangunan, untuk terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa, dan makmur.¹ Proses pembangunan memiliki tiga tujuan yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.²

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu memerlukan pembangunan secara berencana dengan suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.³

Ketersediaan infrastruktur jalan membawa kebaikan terhadap aktivitas masyarakat desa, dan juga sebaliknya jika tidak ada pembangunan jalan, maka

¹Ignatius Adiwidjaja, *Politik Bernegara*, (Zahir Publishing, 2017), hlm. 47

²Warsilan W, Noor A, Peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan pembangunan di kota Samarinda, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol. 31. No. 2, (2015), hlm. 359-366

³ Bonaraja Purba, dkk, *Ekonomi Pembangunan*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 1

kemungkinan besar akan berdampak buruk terhadap aktivitas masyarakat.⁴ Jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Pentingnya keberadaan jalan yang baik juga mendapat perhatian dalam Islam, aspek pembangunannya tentu mempunyai karakteristik dan orientasi yang berbeda dengan pembangunan dalam ekonomi konvensional. Islam memandang bahwa tidak hanya pembangunan secara material saja yang penting, tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral juga sangat penting. Karena pembangunan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu yaitu dunia dan akhirat.⁶ Rasulullah SAW bersabda:

يُمِيطُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

"Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah"⁷

Oleh karena itu, Allah SWT memberikan syariat atau undang-undang Islam yang ditujukan agar dapat membimbing manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Syariat Islam telah memastikan adanya kesesuaian di dalam kehidupan manusia, maka apabila peraturan Islam dilaksanakan

⁴Adiwidjaja, I., N. Bagus, S. Slaman, *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Instansi Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, (2022), hlm. 4

⁵ Kristiawan, P. R., Dewi, D. A. S., Suharso S, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang), *Borobudur Law Review*, Vol. 2. No. 1, (2020), hlm. 30-39

⁶ Amri Amir, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (WIDA Publishing, 2021), hlm. 23

⁷ Hadits Riwayat Bukhari

berdasarkan panduan objektif-objektif syariah yang umum maupun khusus, maka pasti kestabilan dan keadilan sosial ekonomi akan tercapai.⁸

Sesuai dengan slogan “Arah Baru Batanghari Tangguh” pada kepemimpinan M. Fadhil Arief Bachtiar, pada tahun 2022 akan menunjukkan percepatan signifikan untuk mewujudkan janji-janji politiknya. Kabupaten Batanghari merupakan salah satu kabupaten di bagian tengah Provinsi Jambi. Ibukota Kabupaten Batanghari berada di Kecamatan Muara Bulian.⁹ Berdasarkan keputusan Bupati Batanghari Nomor 303 Tahun 2017 tentang penetapan status ruas jalan kabupaten dalam Kabupaten Batanghari. Menetapkan ruas-ruas jalan kabupaten dalam Kabupaten Batanghari terbagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa.¹⁰

Tabel 1

Panjang Jalan Berdasarkan Jenisnya

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Jalan Nasional	146,225
2	Jalan Provinsi	210,763
3	Jalan Kabupaten	1011,800
Total		1.368,788 Km

Sumber : Kantor Dinas PUPR Kabupaten Batanghari

Saat ini kondisi jalan baik nasional, provinsi, maupun kabupaten banyak yang mengalami kerusakan walaupun belum mencapai umur rencana, dengan kondisi tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan. Jalan nasional dengan kondisi baik panjang ruas 114,857 km, jalan nasional

⁸ Gultom, Rifyal Zuhdi, Annisa Qadarusman Tini, "Pembangunan infrastruktur dalam Islam: Tinjauan ekonomi dan sosial", *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6. No. 2, (2020), hlm. 2

⁹ Pemerintah kabupaten Batanghari, <https://batangharikab.go.id/> diakses pada 29 Juni 2022

¹⁰ Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 303 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batang Hari

dengan kondisi rusak panjang ruas 0,945 km. Sedangkan jalan provinsi dengan kondisi baik panjang ruas 57,890 km, jalan provinsi dengan kondisi rusak panjang ruas 42,502 km. Kemudian jalan kabupaten dengan kondisi baik panjang ruas 284,645 km, jalan kabupaten dengan kondisi rusak panjang ruas 241,897 km.¹¹

Jalan Simpang Kubu Kandang - Desa Lubuk Ruso di Kecamatan Pelayung merupakan jalan utama penghubung antar empat desa, yaitu Desa Kubu Kandang, Desa Kuap, Desa Senaning dan Desa Lubuk Ruso. Kondisi jalan yang memprihatinkan saat musim hujan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat, di mana terjadi keterlambatan sarana pembawa hasil pertanian dan hasil kebun menuju pasar karena merupakan akses terdekat. Selain di bidang perekonomian akses jalan juga sangat penting dalam bidang pendidikan, kesehatan dan juga sosial.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Sohibor Redo selaku Kabid Bina Marga, jalan rusak di Kabupaten Batanghari disebabkan oleh angkutan barang yang melebihi tonase, kurangnya pemeliharaan dikarenakan terbatasnya dana pemerintah daerah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu pemeliharaan jalan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji dengan mengangkat judul "**Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**".

¹¹ Badan Pusat Statistik, <https://batangharikab.bps.go.id> diakses pada 28 Desember 2022

¹² Observasi awal, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari, 6 Desember 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan maka penelitian ini akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi?
2. Apa saja tantangan dan peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan lebih terarah dengan baik maka untuk mempermudah penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang "**Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Infrastruktur Jaland di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi pada tahun 2022**". Dalam proses penelitian ini penulis menentukan ruas jalan Simpang Kubu Kandang - Desa Lubuk Ruso di Kecamatan Pelayung sepanjang 11,450 km sebagai objek atau lokasi penelitian.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari.

- b. Untuk mengetahui tantangan dan peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan maka terdapatlah kegunaan penelitian, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dan melengkapi kajian-kajian yang mengarah dan mengembangkan ilmu pemerintahan. Selain itu diharapkan juga bisa di jadikan bahan rujukan peneliti berikutnya yang mengambil objek yang berbeda.
- b. Secara Praktis Sebagai sumbangsih pengetahuan mahasiswa tentang strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari. Dan bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan untuk menganalisis permasalahan di lapangan tentang strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari.
- c. Secara akademis sebagai bahan untuk memenuhi syarat dan penjelasan tingkatan ilmu pendidikan guna memperoleh gelar strata satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi buku-buku atau literatur studi kepustakaan ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Sepanjang penelitian peneliti mengambil buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Aryananda, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ditulis pada tahun 2020, dengan judul *"Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Alokasi Dana Desa Di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau"*. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bentuk atau Penataan cara pelaksanaan program antara lain : tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, lingkungan pemukiman masyarakat desa, dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.¹³
2. Penelitian yang dilakukan Nurpazilah, mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ditulis pada tahun 2022, dengan judul *"Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Jalan di Kabupaten ditinjau dari Peraturan Daerah*

¹³ Rizki Aryanda, *Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Alokasi Dana Desa Di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020)

Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 (Studi Kasus Jalan Kabupaten Sarolangun di Kecamatan Limun Provinsi Jambi)" . Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan Implementasi perencanaan pemeliharaan jalan belum berjalan di semua Desa di Kecamatan Limun yang mendapatkan proyek pembangunan jalan pada tahun anggaran 2018, 2019 hingga 2020. Sedangkan pada tahun anggaran RKPD tahun 2022, pemeliharaan jalan tidak memasukkan jalan rusak di Kecamatan Limun menjadi targetnya.¹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nopriza Hevina, mahasiswi Program Studi Hukum Penataan Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ditulis pada tahun 2022, dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (studi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara)*". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur jalan kabupaten Lampung Utara kurang baik. Faktanya penyebab terjadi pembangunan infrastruktur jalan adanya kesalahan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah sehingga menimbulkan defisit anggaran dan terbebani hutang daerah dan kisruhnya

¹⁴ Nurpazilah, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Jalan di Kabupaten ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 (Studi Kasus Jalan Kabupaten Sarolangun di Kecamatan Limun Provinsi Jambi)*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2022)

urusan politik kepala daerah yang menyebabkan ketidakpastian masalah anggaran dan masalah hutang daerah.¹⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ditulis pada tahun 2020, dengan judul "*Strategi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam Menangani Kemacetan di Kecamatan Alam Barajo.*" Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan strategi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam Mengatasi Kemacetan di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yaitu menerapkan manajemen lalu lintas (traffic management) yang tepat dan efektif, keberpihakan kepada transportasi umum, peningkatan kapasitas jalan, perbaikan daya dukung jaringan jalan, dan pembatasan kendaraan.¹⁶
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Santika, Hj. Aji Ratna Kusuma, dan Haryono Susilo Utomo, Mahasiswa Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman , ditulis pada tahun 2019, dengan judul "*Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara bertujuan untuk

¹⁵ Hevina, Nopriza, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (studi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2022)

¹⁶ Firmansyah, *Strategi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam Menangani Kemacetan di Kecamatan Alam Barajo*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020)

melancarkan akses antara Desa dan penyaluran bahan-bahan keperluan sehari-hari, pengurusan administrasi maupun sarana transportasi umum.¹⁷

Jadi, antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah penelitian mengkaji masalah tentang pembangunan infrastruktur jalan. Dan perbedaannya adalah penelitian pada lokasi penelitian dan teknik analisis data yang digunakan. Fokus penelitian ini adalah strategi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.¹⁸ Supaya memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari.

Sugiyono menyatakan bahwa "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci". Pendekatan kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan

¹⁷ Ratna Santika, Hj. Aji Ratna Kusuma, dan Haryono Susilo Utomo, *Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*, Universitas Mulawarman, (2019)

¹⁸ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2011), hlm. 22

peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen).¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²⁰ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan di kabupaten Batanghari.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian dapat dimuat dalam sebuah penelitian atau skripsi jenis penelitian lapangan.²¹ Tempat dan waktu penelitian ini adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari pada tanggal 10 April 2023 s/d 10 Juli 2023.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan sekunder.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006) hlm. 142

²¹ Sayuti Una, *Pedoman Panduan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm 30

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber atau lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil wawancara mengenai strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari dalam perbaikan infrastruktur jalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Adapun peneliti memperoleh data ini dari studi pustaka, referensi jurnal maupun dokumen dan buku tentang strategi pembangunan yang dapat mendukung dan membantu dalam penelitian ini.²²

b. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan seperti observasi dan wawancara dari sejumlah responden atau informan yang berkaitan permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian ini yaitu wawancara bersama Kepala Bidang Bina Marga, Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan masyarakat. Observasi yaitu mengamati kejadian yang terjadi pada keadaan

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press, 2020), hlm. 49-50

sebenarnya. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber lain atau data tidak langsung yang berkenaan dengan tema penelitian berupa buku, laporan, catatan dan lain sebagainya hasil dari penelusuran data.²³

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.²⁴ Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu, keikutsertaan peneliti dalam situasi penelitian, sehingga peneliti dapat mengamati, mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas-aktivitas orang yang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan atau percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu, antara pewawancara (*interviewer*) kepada terwawancara (*interview*). Teknik wawancara kualitatif pada penelitian ini yaitu bebas, mendalam, dan terarah.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 52

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 67-68

Tabel 2
Data Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kabid Bina Marga	1 Orang
2	Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan	1 Orang
3	Sekretaris Desa Kubu Kandang	1 Orang
4	Kepala Desa Kuap	1 Orang
5	Kepala Desa Senaning	1 Orang
6	Sekretaris Desa Lubuk Ruso	1 Orang
7	Masyarakat	9 Orang
	Jumlah	15 Orang

Sumber : Kantor Dinas PUPR Kabupaten Batanghari

c. Dokumentasi

Dokumentasi (*documentation*) yaitu, data-data tertulis yang dapat digunakan sebagai informasi dalam penelitian, dokumen dapat berbentuk naskah, foto, hasil penelitian sebelumnya atau buku terkait dengan fokus penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis (terutama statistik) yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu sebelum di lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.²⁵ Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka yang harus dilewatkan dalam tahap ini yaitu:

- a. Pengumpulan Data, pengumpulan data diperoleh dari lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa kembali dan diatur untuk diurutkan.

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 72

- b. Reduksi Data, penulis mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan bidang yang diteliti. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.
- c. Penyajian Data, dari data yang dikumpulkan dan direduksi kemudian disajikan menjadi informasi, selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang meliputi berbagai jenis keterangan.
- d. Penarikan kesimpulan, pada kesimpulan penulis akan memberikan gambaran akhir mengenai apa yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulis skripsi tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dalam pembahasan-pembahasan yang ada di dalam bab nya sebagai berikut :

Bab I mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dipaparkan konsep perencanaan dan strategi pembangunan di Indonesia, tahapan perencanaan pembangunan di Indonesia, dokumen perencanaan pembangunan, dan tahapan penyusunan strategi.

Bab III mendeskripsikan wilayah kajian penelitian yaitu, Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, meliputi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi dan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari.

Bab IV inti analisa skripsi yaitu, strategi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam perbaikan infrastruktur jalan dan tantangan serta peluang dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.

BAB II

PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

A. Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian dan Tujuan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, yang dituangkan dalam suatu dokumen sebagai panduan bagi para pelaku pembangunan untuk mencapai tujuan negara. Perencanaan pembangunan dibuat pada tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Perencanaan pembangunan mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan (RKP).²⁶

Perencanaan pembangunan adalah fungsi manajemen pembangunan yang pertama dan sangat fundamental bagi pembangunan, perencanaan pembangunan adalah dasar atau pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Tanpa perencanaan pembangunan maka pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik.²⁷ Perencanaan pembangunan di tandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu, Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain.²⁸

²⁶ Hanif Nurcholis, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, (Grasindo, 2009), hlm. 18

²⁷ Iskandar Kato, dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 36

²⁸ Limega Candrasa, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), hlm. 37

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dihimpun berdasarkan pendapat para pakar sebagai berikut:

- a. Listiyaningsih mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.
- b. Soekartawi memberi arti perencanaan pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.
- c. Lewis mendefinisikan Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengerahan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.²⁹

Adapun tujuan praktik perencanaan pembangunan kabupaten adalah :

- a. Menyusun atau memproduksi dokumen perencanaan sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/pelaku (*stakeholders*).

²⁹ Iskandar Kato, dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 36

- b. Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan-harapan dan tujuan-tujuan pembangunan.
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui *monitoring* dan evaluasi.
- d. Memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya.³⁰

Pembangunan berasal dari kata dasar bangun yang artinya bangkit. Pembangunan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan untuk melakukan perubahan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik. Pembangunan adalah segala sesuatu yang bersifat dinamis, bukan statis. Hal ini disebabkan pembangunan selalu mengalami perubahan dari yang belum ada menjadi ada, dari yang belum bagus menjadi lebih bagus lagi, dengan demikian pembangunan mengandung arti perubahan tanpa akhir.

Beberapa pengertian pembangunan yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Nugroho dan Dahuri menyatakan pembangunan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
- b. Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

³⁰ Hanif Nurcholis, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, (Grasindo, 2009), hlm. 9-10

- c. Kartasasmita mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.³¹

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang atau kelompok orang ke arah yang lebih baik dengan mengerahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan pada hakikatnya merupakan perubahan yaitu perubahan dari suatu situasi dan kondisi yang satu menuju situasi dan kondisi lain yang lebih baik, perubahan dari pola pikir, perilaku dan sikap mental tradisional dan irasional menuju kepada yang lebih modern dan rasional.

Dalam perencanaan pembangunan nasional terdapat dua langkah yang perlu dipertimbangkan:

- a. Menentukan strategi perencanaan pembangunan dengan menetapkan strategi dasar yang meliputi tujuan pembangunan nasional, penentuan sasaran umum pembangunan nasional, dan penentuan prioritas pembangunan.
- b. Penentuan kerangka rencana pembangunan, hal ini disebut sebagai kerangka makro rencana, yang berupaya menghubungkan antara variabel, pembangunan dari segenap aspek kehidupan bangsa dan negara..

Pembangunan bukan hanya merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi belaka (pangan, sandang, dan papan), melainkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yaitu suatu keadaan di mana semua

³¹ Iskandar Kato, dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 33-34

kebutuhan masyarakat dapat tercukupi dan terpenuhi dengan baik. masyarakat merasakan kesejahteraan dalam setiap aspek kehidupan dan penghidupannya.³²

Ciri-ciri perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkaitan pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*). Ciri-ciri perencanaan pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yang setelah dikurangi laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.
- c. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
- d. Adanya perluasan kesempatan kerja .
- e. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antardaerah.
- f. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.

³² M. Syahri Thohir, *Hukum Pembangunan: Reformasi Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Kebijakan dan Pelayanan Publik*, (CV Budi Utama, 2019), hlm. 1

- g. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri atau nasional.
- h. Usaha terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi.³³

2. Tahapan Perencanaan Pembangunan

Pada dasarnya ada 4 tahapan perencanaan pembangunan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Tahap penyusunan perencanaan pembangunan

Tahap ini adalah awal dari proses penyusunan naskah atau rancangan perencanaan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk tingkat daerah. sebagai perwujudan dari perencanaan partisipasi dan asas demokrasi, maka sebelum sampai pada tahap penyusunan naskah atau rancangan perencanaan pembangunan, maka dilakukan penjarangan aspirasi dan keinginan atau kebutuhan masyarakat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah pembangunan.

Setelah dilakukan penjarangan aspirasi masyarakat, lalu tim penyusun perencanaan pembangunan menyusun rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan. Rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun lalu di musyawarahkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Adapun tujuan Musrenbang adalah untuk mendapatkan masukan saran maupun kritik dari masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang

³³ Randy R Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pembangunan Indonesia*, (Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 41-42

berkepentingan) seperti tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, alim ulama dan sebagainya.

b. Tahap penetapan rencana

Setelah naskah atau dokumen yang telah mendapatkan masukan dalam Musrenbang, maka naskah dan dokumen perencanaan pembangunan ditetapkan oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk nasional dan kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tingkat daerah

c. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana

Setelah perencanaan pembangunan mendapatkan pengesahan, maka selanjutnya dilakukan tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh satuan organisasi atau eksekutif baik di tingkat nasional maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat daerah. Sejalan dengan tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan, kemudian dilakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

d. Tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana

Setelah selesai pelaksanaan perencanaan pembangunan, kemudian dilakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana oleh BAPPENAS maupun BAPPEDA. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan mengukur capaian kinerja masing-masing satuan kerja maupun OPD yang telah melaksanakan perencanaan pembangunan. Tujuan utama evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana ini adalah untuk melihat apakah perencanaan pembangunan sudah benar-

benar meningkatkan kualitas pelayanan dan taraf hidup masyarakat sebagai objek pembangunan.³⁴

3. Dokumen Perencanaan Pembangunan

Dalam Penataanran perencanaan pembangunan nasional dikenal hierarki dokumen perencanaan, sebagai berikut³⁵ :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Setiap 20 tahun akan ada pendataan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, ketahanan sosial budaya, kualitas lingkungan hidup, kapasitas infrastruktur serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kekayaan intelektual. RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan peraturan daerah tentang RPJPD adalah untuk:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- 2) Menjamin tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat
- 3) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- 4) Menjamin tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

³⁴ Iskandar Kato, dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 40-41

³⁵ Samsul Ramli, Muhammad Ide Ambardi, *Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Visi Media, 2016) hlm. 3-4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJMD berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Selain itu RPJMD juga juga sebagai pedoman Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD di koordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) secara berkala. RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui

- 1) Koordinasi antar pelaku pembangunan
- 2) Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat
- 3) Partisipasi masyarakat
- 4) Pengguna sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

- 1) Visi, misi, dan program kepala daerah
- 2) Tujuan, sasaran, strategi
- 3) Arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
- 4) Program perangkat daerah

5) Rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif

c. Renstra

Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis

d. RKP

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Berdasarkan peraturan pemerintah dalam negeri nomor 32 tahun 2013 tentang rencana kerja pembangunan daerah menyatakan bahwa untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam dokumen rencana kerja pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang terarah.

B. Strategi Pembangunan

1. Pengertian Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah.³⁶ Berikut pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, diantaranya:

³⁶ Patta Rapanna, Yana Fajriah, *Menembus Badai Ekonomi*, (SAH Media, 2018), hlm. 8

- a. Argysis, mintzberg dan miner menyatakan strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.
- b. David menyatakan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.
- c. Chandler menyatakan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah yaitu:

- a. Efektif, yaitu cara untuk mencapai tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif-alternatif kemudian diimplementasikan dengan cara bekerja yang tepat dengan waktu yang cepat. Pekerjaan yang efektif berhubungan tentang penjadwalan, perencanaan, dan pengekseskuan keputusan yang tepat. Suatu pekerjaan bisa dikatakan efektif jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil tercapai.
 - b. Efisien, yaitu suatu cara atau usaha yang mengharuskan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan meminimalisir pemborosan anggaran, waktu dengan hasil yang maksimal dan memuaskan sehingga berbicara tentang efisien maka berkaitan erat dengan ketepatan waktu yang
-

mengharuskan suatu organisasi maupun orang yang bekerja dengan maksimal tanpa harus mengeluarkan *cost* atau biaya yang berlebihan.

- c. Tujuan, yaitu menguraikan sesuatu atas sebuah rencana dengan kata lain yang menjelaskan dimana, oleh siapa dan apa yang nantinya akan dihasilkan. Tujuan juga merupakan penjabaran dari visi dan misi serta mencakup hal yang akan dihasilkan ataupun dicapai dalam sebuah organisasi maupun perusahaan

Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis lingkungan strategis.

Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- a) Kebijaksanaan dasar strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
- b) Kerangka rencana makro untuk menghubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
- c) Perkiraan sumber pembangunan khususnya sumber biaya pembangunan.
- d) Kerangka kebijaksanaan yang konsisten, seperti kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga, dan kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu perlu dirumuskan dan dilaksanakan.
- e) Program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.

- f) Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan *distributive justice* pembangunan tersebut.

2. **Macam-macam Strategi Pembangunan Indonesia**

Strategi pembangunan ekonomi dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu strategi pertumbuhan, strategi pembangunan dengan pemerataan, strategi pembangunan, dan strategi pendekatan kebutuhan pokok. Beberapa strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut³⁷:

a) Strategi pertumbuhan

Inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (*trickle - down - effect*), pendistribusian kembali.
3. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.

³⁷ Djamin, Zulkarnain, Struktur Perekonomian dan Strategi Pembangunan Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, (1995), hlm. 73

b) Strategi pembangunan pemerataan

Substansi dari konsep strategi ini adalah ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik *sosial engineering*, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu.

c) Strategi pembangunan

Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya.

d) Strategi pendekatan kebutuhan pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal, strategi ini dikembangkan oleh organisasi perburuhan. Sedunia (ILO) pada tahun 1975, yang menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.

3. Tahapan Penyusunan Strategi

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi. Maka ada enam tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu³⁸:

- a) Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan.

³⁸ Triton, *Marketing Strategic*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), hlm. 17

- b) Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis.
- c) Menyusun perencanaan tindakan.
- d) Menyusun rencana penyumberdayaan.
- e) Mempertimbangkan keunggulan.
- f) Mempertimbangkan berkelanjutan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

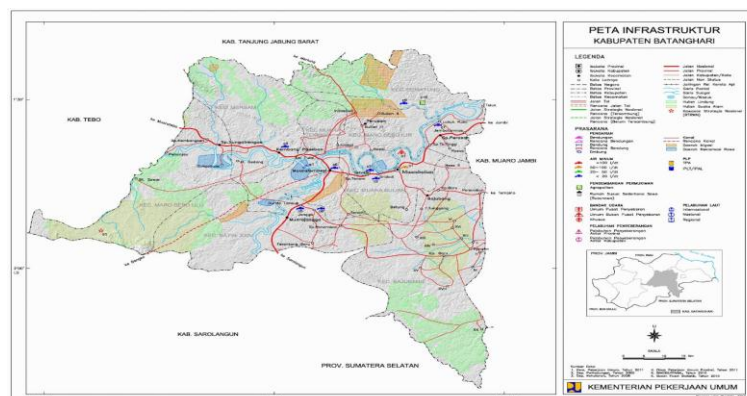
A. Kabupaten Batanghari

1. Letak Geografis

Kabupaten Batang Hari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.180,35 Km². Kabupaten Batang Hari secara geografis terletak pada posisi 1°15' lintang selatan sampai dengan 2°2' lintang selatan dan diantara 102°30' bujur timur sampai dengan 104°30' bujur timur. Dalam lingkup provinsi letak Kabupaten Batang Hari berada di wilayah bagian tengah provinsi dan merupakan daerah perbukitan. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Batang Hari berbatasan : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo.³⁹

Gambar 1

Peta Wilayah Kabupaten Batanghari



Sumber : <https://batangharikab.go.id>

³⁹ Pemerintah kabupaten Batanghari, <https://batangharikab.go.id/> diakses pada 24 Februari 2023

2. Demografi

Banyaknya penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Batanghari⁴⁰, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3

Banyaknya Penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mersam	17068	16178	33246
Maro Sebo Ulu	29408	19180	39588
Batin XXIV	16193	15556	31749
Muara Tembesi	17206	16688	33894
Muara Bulian	35288	33672	68960
Bajubang	21717	20240	41957
Maro Sebo Ilir	7934	7387	15321
Pemayang	18748	18201	36985

Sumber : <https://batanghari.bps.go.id>

3. Kondisi infrastruktur jalan

Salah satu infrastruktur yang terpenting pada suatu lokasi adalah memiliki jalan yang memadai. Fungsi utama dibangunnya infrastruktur adalah sebagai sarana untuk menyambungkan dan menghubungkan antara daerah satu dengan lainnya, sehingga proses kehidupan masyarakat akan lebih mudah. Percepatan perbaikan atau pembangunan jalan penghubung antar desa atau kelurahan dan penghubung antar kecamatan merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Batanghari seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik, <https://batanghari.bps.go.id> diakses pada 24 Februari 2023

Tabel 4**Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Batanghari**

No	Kondisi Jalan	Km	Persen (%)
1	Baik	260,12 Km	25,71 %
2	Sedang	154,82 Km	15,30 %
3	Rusak ringan	104,03 Km	10,28 %
4	Rusak berat	492,83 Km	48,71 %
	Total	1011,800 Km	100 %

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Batanghari

Penanganan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten itu sudah dilaksanakan sepanjang 120,75 KM. Ratusan kilo meter jalan itu tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Batanghari, Pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan sepanjang 120,75 KM dengan total anggaran sebanyak Rp271.023.858.638,00..⁴¹

B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari**1. Sejarah**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari merupakan kantor dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk wilayah Kabupaten Batang Hari, provinsi Jambi. Kedinasan ini memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

⁴¹ Redaktur 1, Jelang Dua Tahun Kepemimpinannya Bupati Batanghari Genjot pembangunan Jalan, <https://koranpelita.co/2023/01/02> diakses pada 24 Februari 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 80 tahun 2022 tentang Organisasi dan Penataan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut⁴² :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 463 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan di bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 464, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

⁴² Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Penataan Kerja Perangkat Daerah

- f. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 463 terdiri dari:

- a. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, bidang Sumber Daya Air, bidang Peralatan Pengujian dan Jasa Kontruksi, dan bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta tugas pembantuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2) Pengelolaan data dan informasi di bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, bidang Bidang Pengairan, bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi, dan bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, bidang Pengairan, bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi, dan bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- 4) Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 5) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, bidang Pengairan, bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi, dan bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 6) Pelaksanaan urusan organisasi dan Penataanlaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 7) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 8) Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pendataan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 9) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, bidang Pengairan, bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi, dan bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 10) Kordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, bidang Pengairan, bidang Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi, dan bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- 11) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 12) Pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- 13) Membuat dan menyusun serta mengumpulkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- 14) Pelaksanaan urusan kePenatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan mengelola administrasi teknik, menyusun perencanaan teknik serta melaksanakan teknik operasional bidang Bina Marga serta tugas-tugas lain menjadi tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengelolaan penyelenggaraan administrasi teknik di bidang kebinamargaan;
- 2) Penyusunan dan perumusan perencanaan teknik di bidang kebinamargaan;
- 3) Penyelenggaraan tugas operasional bidang kebinamargaan;
- 4) Menyampaikan laporan baik lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan tugas kebinamargaan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban selaku pimpinan pelaksana;
- 5) Pemberian sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan;

- 6) Pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan membuat serta mengumpulkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing seksi yang dibawahinya; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Seksi pembangunan dan peningkatan jalan berada dibawah bidang Bina Marga. Seksi pembangunan dan peningkatan jalan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga. Seksi pembangunan dan peningkatan jalan sebagaimana dimaksud, melaksanakan tugas :

- 1) Membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan
- 2) Melaksanakan kegiatan survey dan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan guna untuk menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan serta fasilitas lainnya
- 3) Menyusun dan menyiapkan gambar/rancangan teknis pembangunan dan peningkatan jalan serta fasilitas lainnya
- 4) Menyusun dan menyiapkan bestek serta rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan dan peningkatan jalan serta fasilitas penunjangnya
- 5) Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas operasional pembangunan dan peningkatan jalan

- 6) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan peningkatan jalan kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang
 - 7) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembangunan dan Peningkatan Jalan.
 - 8) Menilai prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Visi dan misi

Visi adalah perwujudan yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan misi adalah tonggak perencanaan strategis yang sejalan dengan pembentukan tujuan dan sasaran yang perumusannya harus dilakukan secara objektif dan memberikan peluang untuk dilakukan perubahan disesuaikan dengan tuntutan lingkungan, oleh karena itu misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terlaksana dengan baik.

Visi

”Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Yang Berkesinambungan Dengan Konsistensi Penataan Ruang”

Misi

- a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air untuk Pertanian.
- c. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Air Minum untuk Masyarakat.

- d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Operasional Pengawasan, Penataan, dan Pemanfaatan Ruang Kabupaten.⁴³

⁴³ PUPR Kabupaten Batanghari, <https://pupr.batangharikab.go.id> diakses pada 24 Februari 2023

BAB IV

**STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BATANGHARI DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
JALAN**

A. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Batanghari

Percepatan perbaikan atau pembangunan jalan penghubung antar desa atau kelurahan dan penghubung antar kecamatan merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Batanghari. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 463 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), perencanaan pembangunan harus melalui tahapan-tahapan yang terencana yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana. Pelaksanaan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan jalan pada ruas jalan simpang kubu kandang - Desa Lubuk Ruso ini berada pada tingkatan Kabupaten Batanghari.

1. Penyusunan Rencana

Pembangunan jalan di Kabupaten Batanghari disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batanghari tahun 2021 - 2026. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa visi kabupaten adalah

perubahan menuju arah baru batanghari tangguh, secara umum sasaran pembangunan Kabupaten Batanghari yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD 2021-2026, dengan tema dalam RKPD Tahun 2022 adalah “Sinergisitas Dalam Akselerasi Pembangunan Daerah.”

Berdasarkan program batanghari tangguh maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun yaitu:

- a. Tahun pertama yaitu meningkatkan kemantapan jalan kabupaten, hal ini dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum untuk pembangunan jalan pada tahun kerja pertama dan kedua. kegiatan pengalokasian dilakukan dengan cara pengusulan anggaran oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari dalam rapat penyusunan anggaran tahun sebelumnya. Tahapan persiapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Batanghari dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKPD yang terdiri dari pegawai di masing-masing dinas. Setelah dibentuk tim maka dilakukan orientasi atau penyamaan persepsi tentang tugas dan fungsi mereka dalam menyusun dokumen RKPD, diberikan juga pemahaman tentang apa itu dokumen RKPD dan membahas tentang apa saja, serta harus memuat apa saja. Setelah dilakukan kegiatan penyusunan agenda tim penyusun RKPD, hal ini dilakukan agar jelas agenda kegiatan tujuan akhir yaitu terbentuknya dokumen RKPD. Tahapan-tahapan agenda dilakukan sebagai pemantau atau monitoring agar tidak sembarangan dalam melakukan kegiatan dan selesai tepat waktu. Selanjutnya dilakukan

penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berupa data apa saja rencana yang masuk dari hasil musrenbang dan berapa besaran kebutuhan anggaran.

- b. Tahun kedua yaitu meningkatkan kemandirian jalan kabupaten, seperti halnya dengan tahun pertama, pada tahun kedua ini juga dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan jalan pada tahun kerja pertama.
- c. Tahun ketiga yaitu mempercepat peningkatan kemandirian jalan kabupaten, pada tahun ketiga tidak ada lagi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pengerjaan jalan.
- d. Tahun keempat yaitu mempercepat peningkatan kemandirian jalan kabupaten, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan skema pembiayaan tahun jamak.
- e. Tahun kelima yaitu mempercepat peningkatan kemandirian jalan kabupaten, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan skema pembiayaan tahun jamak.

Penyelenggaraan jalan menjadi program prioritas di Kabupaten Batanghari yang diberikan anggaran besar untuk dicapai selama lima tahun. Dokumen RPJMD kemudian dijadikan pedoman atau acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari yang merupakan satuan kerja pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan dokumen penetapan RKPD Kabupaten Batanghari tahun

2022, diketahui rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari dalam hal pembangunan jalan adalah sebagai berikut:

- a. Survey kondisi jalan/jembatan dengan target 1 Dok dan anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 di Kabupaten Batanghari
- b. Pembangunan jalan dengan target 14 km dan anggaran sebesar Rp21.442.000,00 di Kabupaten Batanghari
- c. Rekontruksi jalan dengan target 8 km dan anggaran sebesar Rp39.914.000,00 di Kabupaten Batanghari
- d. Rehabilitasi jalan dengan target 10 km dan anggaran sebesar Rp32.607.000,00 di Kabupaten Batanghari
- e. Pemeliharaan berkala jalan dengan target 14 km dan anggaran sebesar Rp 3.430.000,00 di Kabupaten Batanghari.

2. Penetapan Rencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 Kabupaten Batanghari ditetapkan pada 7 Juli 2021. Penetapan RKPD merupakan hasil rangkuman dan penyempurnaan dari prioritas kegiatan pembangunan tiap kecamatan, penetapan anggaran untuk prioritas-prioritas kegiatan tersebut didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ketetapan rencana tersebut dilakukan setelah sebelum dilakukan musrenbang yang dihadiri oleh perwakilan SKPD dan tokoh masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan

kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja OPD dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD dan pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 guna menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2022, dan sebagai acuan dokumen rencana kerja perangkat daerah dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyalarsan prioritas pembangunan dan sinergisitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkatan pemerintah.

Selain hal tersebut, RKPD juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat, sekaligus menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Tahapan pengendalian pelaksanaan rencana diperlukan agar rencana yang telah ditetapkan dapat terpantau pelaksanaannya. Tahun 2022 adalah tahun pelaksanaan RKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Untuk mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan tahun anggaran 2022 yang menyatukan sistem

perencanaan pembangunan Kabupaten Batanghari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. RKPD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Batang Hari 2021-2026.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari pelaksanaan program penyelenggaraan jalan tahun 2022 yaitu:

a. Rekonstruksi Jalan

Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Pada tahun 2022 panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan 8 km dengan anggaran Rp39.914.000,00.

Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan menteri pekerjaan umum no 13 tahun 2011 tentang penataan cara dan penilikan jalan dilakukan secara setempat meliputi kegiatan:

1. Perbaiki seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud

2. Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali
 3. Perbaiki perlengkapan jalan
 4. Perbaiki bangunan pelengkap
 5. Pemeliharaan/pembersihan rumaja.
- b. Rehabilitasi Jalan

Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pada tahun 2022 panjang jalan yang di rehabilitasi 10 km dengan anggaran Rp32.607.000,00.

Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana
2. Bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun

3. Bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya
4. Bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan
5. Bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara
6. Bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Rehabilitasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:

1. Pelapisan ulang
2. Perbaikan bahu jalan
3. Perbaikan bangunan pelengkap
4. Perbaikan/penggantian perlengkapan jalan
5. Penambalan lubang
6. Penggantian dowel/tie bar pada perkerasan kaku (rigid pavement)
7. Penanganan tanggap darurat
8. Pekerjaan galian
9. Pekerjaan timbunan
10. Penyiapan tanah dasar
11. Pekerjaan struktur perkerasan.

c. Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Pada tahun 2022 panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan 14 km dengan anggaran Rp3.430.000,00. Kegiatan pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap
2. Bangunan pelengkap jalan yang mempunyai kondisi baik sekali dan baik.

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

1. Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan
2. Pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah)
3. Pemeliharaan/pembersihan rumaja
4. Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija
5. Pengisian celah/retak permukaan (sealing)
6. Laburan aspal
7. Penambalan lubang
8. Pemeliharaan bangunan pelengkap
9. Pemeliharaan perlengkapan jalan

10. Grading operation / Reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Merujuk pada teori strategi pembangunan bahwa efektif dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari untuk ketepatan waktu belum sesuai karena dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan perbaikan bertahap karena keterbatasan anggaran. Kemudian untuk ketepatan pengerjaannya sudah cukup efektif karena perbaikan jalan menggunakan perkerasan jalan beton (*rigid pavement*). Perkerasan beton mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan perkerasan aspal seperti biaya pemeliharaan rendah, umur pelayanan lebih lama bisa mencapai 20 tahun, daya dukung terhadap beban tinggi, dan lebih tahan terhadap genangan air. Tingkat efisien dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari belum dikatakan efisien karena dalam perbaikan infrastruktur jalan masih ada beberapa daerah yang belum tersentuh dan dievaluasi untuk diadakan perbaikan infrastruktur jalan.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi dari pelaksanaan perencanaan diperlukan agar menjadi masukan bagi perencanaan di tahun yang akan datang. Hasil dari pemantauan pengendalian dijadikan laporan oleh SKPD untuk evaluasi tahun berjalan. Hasil musrenbang yang telah dilakukan di tingkat kecamatan juga menjadi evaluasi bagi tahun berjalan, terutama untuk capaian RPJMD yang perencanaannya selama lima tahun sekali. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdapat salah satu faktor penting yaitu dengan peningkatan sarana dan prasarana insfrastruktur, hal

ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan wilayah dan memperlancar arus barang dan jasa.

Secara umum, pada tahun 2016 proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 18,095 persen, secara bertahap telah di tingkatkan pada tahun 2020 menjadi 25,075 persen. Dengan rincian pada tahun 2016 jalan dalam kondisi baik sepanjang 183,082 Km meningkat menjadi 252,72 Km pada tahun 2020, jalan dalam kondisi sedang tahun 2016 sepanjang 125,246 Km naik menjadi 120,89 Km pada tahun 2020, jalan dalam kondisi rusak tahun 2016 sepanjang 89,759 Km menjadi 395,64 Km dan jalan dalam kondisi rusak berat tahun 2016 sepanjang 613,712 Km berkurang menjadi 241,56 Km pada tahun 2020. Secara komulatif sampai dengan tahun 2020 pelaksanaan peningkatan jalan yang telah dilakukan adalah sepanjang 69,636 Km, pemeliharaan jalan sepanjang 39,47 Km dan pembukaan jalan baru sepanjang 249,329 Km.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari dengan tujuan meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten telah meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 kondisi awal kinerja 36,14 persen kemudian pada tahun 2022 menjadi 41,01 persen. Dengan arah kebijakan pembangunan ruas jalan, pemeliharaan jalan, peningkatan jalan, dan peningkatan kuantitas fasilitas jalan.

Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari telah melaksanakan pekerjaan terkait perbaikan jalan, pekerjaan ini meliputi kegiatan pembangunan jalan, pelebaran

jalan menuju standar, rekontruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan berkala jalan. Saat ini kondisi infrastruktur jalan kabupaten di Kabupaten Batanghari rusak berat mencapai 54 persen, baik jalan tersebut mencakup jalan fungsional maupun jalan produksi tani.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sohibor Redo selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa:

"Kondisi infrastruktur jalan kabupaten di Kabupaten Batanghari saat ini dalam kondisi persentase mantap nya dari skala 100 persen yang mantap itu 46 persen dan sisanya itu 54 persen dengan kondisi tidak mantap. Yang tidak mantap itu adalah jalan dengan kondisi rusak dan ataupun kontruksi nya berupa pengerasan tanpa penutup aspal."⁴⁴

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Lesti selaku Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa:

"Kita tuh punya jalan panjang nya 1011,8 km itu di luar jalan yang belum masuk SK yang masih baru di buka. Jadi dari 1011,8 km saat ini gambaran nya itu masih 46 persen dalam kondisi mantap selebihnya itu 54 persen dengan kondisi tidak mantap."⁴⁵

⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Sohibor Redo selaku Kabid Bina Marga, 10 Mei 2023

⁴⁵ Wawancara bersama Ibu Lesti selaku Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, 09 Mei 2023

Gambar 3

Penetapan Jalan Kabupaten dalam Kabupaten Batanghari

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BATANGHARI
DISENUNJUNG
JANUARI 2017

**PENETAPAN STATUS RUAS - RUAS JALAN
SEBAGAI JALAN KABUPATEN DALAM KABUPATEN BATANGHARI**

No. Urut	No. Ruas Jalan	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Panjang Ruas Aspal (Km)	Lebar Ruas (M)	Kecamatan
1	041	Jl. Da. Pompa Air - Da. Sungkai	30,490	21,460	10,00	Batanghari
2	032	Jl. Da. Kibangan - Da. Pompa Air	13,300	13,480	10,00	Batanghari
3	028	Jl. Nera - Jl. Lingsar Sei. Buluh	3,130	3,130	10,00	Batanghari
4	004	Jl. Da. Mekar Sari Hara VIII Da. Mekar Sari Hara VIII	2,418	2,415	10,00	Batanghari
5	005	Jl. Kumpang Hara Batanghari - Da. Mekar Sari Hara	4,900	4,900	10,00	Batanghari
6	036	Jl. Sp. Kibangan - Da. Mekar Jaya	7,100	8,300	10,00	Batanghari
7	038	Jl. Nera II - Da. Putajan	1,900	1,900	10,00	Batanghari
8	045	Jl. Kumpang Baru Batanghari - Hara II	6,300	6,300	10,00	Batanghari
9	049	Jl. Da. Pompa Air - Da. Sungkai	6,200	6,200	10,00	Batanghari
10	062	Jl. Da. Persewaan Km 89 - Nera II Batanghari	4,000	5,000	10,00	Batanghari
11	073	Jl. Sp. Gedung Basang Hara - Sp. Jambi	1,700	1,820	10,00	Batanghari
12	080	Jl. Sp. Ladang Peria - Da. Ladang Peria Hara	8,800	8,300	10,00	Batanghari
13	084	Jl. Sp. Pajagan - Jl. Lutan Sei. Buluh	11,000	11,000	10,00	Batanghari
14	085	Jl. Sp. Jambi - Da. Sungkai (Sp. Lutan)	10,000	7,800	10,00	Batanghari
15	004	Jl. Da. Pompa Air - Da. Ladang Peria	7,600	7,600	10,00	Batanghari
16	102	Jl. Da. Sungkai - Sp. Jl. Mekar Jaya	2,190	2,200	10,00	Batanghari
17	099	Jl. Da. Sei Buluh RT. 05, RT. 06	7,670	7,670	10,00	Batanghari
18	018	Jl. Ladang Peria - Da. Sungkai	4,600	3,680	10,00	Batanghari
19	019	Jl. Sp. Kantor Camat Batanghari - Sp. Jambi	3,050	3,050	10,00	Batanghari
20	030	Jl. Laman Teras - Da. Pompa Air	8,000	4,100	10,00	Batanghari
21	021	Jl. Dan. Rantau (Da. Sungkai)	3,900		10,00	Batanghari
22	022	Jl. Kumpang Hara - Kal. Batanghari	1,500	1,100	10,00	Batanghari
23	023	Jl. Ladang Peria - Da. Karang Ayer	1,000	1,000	7,00	Batanghari
24	024	Jl. Da. Mekar Jaya - Da. Mekar Jaya	4,278	3,628	12,00	Batanghari
25	025	Jl. Da. Putajan - RT. 07 RT. 08 Sei. Buluh	4,100	4,100	12,00	Batanghari
26	026	Jl. Da. Singkawang - Da. Pompa Ujung	3,800	3,800	12,00	Batanghari

Sumber : Kantor Dinas PUPR Kabupaten Batanghari

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa panjang jalan kabupaten di Kabupaten Batanghari 1011,8 Km, jalan itu di luar jalan yang belum masuk SK yaitu jalan yang baru di buka. Kondisi infrastruktur jalan kabupaten di Kabupaten Batanghari saat ini 46 persen dengan kondisi mantap dan 54 persen dengan kondisi tidak mantap. Jalan yang tidak mantap itu adalah jalan dengan kondisi rusak ataupun kontruksi nya berupa pengerasan tanpa penutup aspal.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Batanghari telah membangun ruas jalan di 8 kecamatan dengan total panjang 71,14 Km. Senada dengan pernyataan yang telah diungkapkan oleh Bapak Sohabor Redo selaku Kabid Bina Marga mengatakan bahwa:

"Target pembangunan ruas jalan pada tahun 2022 itu mencapai 71,14 Km dengan anggaran sebesar Rp259.000.000.000,00 yang tersebar di 8

kecamatan dan terbagi menjadi 12 titik ruas jalan termasuk ruas jalan Simpang Kubu Kandang sampai Desa Lubuk Ruso."⁴⁶

Gambar 4

Anggaran Perbaikan Jalan Kabupaten Batanghari Tahun 2022

REGISTER KONTRAK BIDANG BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2022		
No	Data Kontrak Pekerjaan	
	Pekerjaan	Nilai Anggaran
1	Jl. Simp. Terusan - Pasar Terusan	10.489.871.800,00
2	Jl. Hangkayo Hitam - SMLI N 8	3.441.505.800,00
3	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sp. Jambi - Ds. Sungkal (Sp. Tekson) (DAK)	6.921.274.500,00
4	Rehabilitasi Jalan Sp. Bungin Panjang - Ds. Sei. Aur	4.973.463.500,00
5	Jl. Sp. PU Bekal - Ds. Tantan	2.992.543.300,00
6	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ds. Terusan - Ujung Tanjung (DAK)	7.998.125.200,00
7	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Sp. Sengkali Baru - Ds. Bukit Harapan (DAK)	11.803.749.600,00
8	Rehabilitasi Jalan Sp. Sei. Rumbal - Ds. Rambutan Masam	9.771.059.500,00
9	Rehabilitasi Jalan Sp. Pematang Gadung - Trans Suaka Mandiri	4.001.582.300,00
10	Jl. Lingkar Sei. Buluh - Jl. SMP 21	2.888.170.700,00
11	Jl. Sp. Napal Siak - Ds. Matapani	3.045.616.500,00
12	Rehabilitasi Jalan Sp. Sei. Rengas - Ds. Peninjauan	5.881.613.200,00
13	Jl. Ds. Pempa Air - Ds. Bungku (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	32.129.035.400,00
14	Jl. Sp. Kantor Camat Bajubang - Sp. Jambi (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	8.744.027.700,00
15	Jl. Sp. Bukit Paku - Ds. Terusan (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	27.462.076.300,00
16	Jl. Ds. Pematang Gadung - Ds. Pematang Gadung (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	11.882.363.100,00
17	Jl. Sp. Kubu Kandang - Ds. Lubuk Ruso (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	21.683.840.000,00
18	Jl. Ds. Kilangan - Ds. Pempa Air (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	19.035.010.300,00
19	Jl. Ds. Pempa Air - Ds. Bungku (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	32.129.035.400,00
20	Jl. Ness - Jl. Lingkar Sei. Buluh (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	10.824.337.900,00
21	Jl. Pl. Raman - Kaos - Ds. Suak Putat (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	11.299.289.200,00
22	Jl. Ladang Peris - Ds. Sungkal (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	4.048.451.600,00
23	Jl. Sei. Ruan - Ds. Rantau Gedang (Sumber Dana Pinjaman Daerah)	13.970.959.500,00
TOTAL		288.901.602.300,00

Sumber : Kantor Dinas PUPR Kabupaten Batanghari

Berikut respons dari masyarakat mengenai perbaikan jalan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari. Wawancara bersama Ibu Aida salah satu masyarakat Desa Kubu Kandang mengatakan bahwa:

"Jalan kabupaten yang ada di desa kami sekarang alhamdulillah sudah bagus semua nya lancar, perbaikan nya ini sebenarnya bertahap kalau jalan ini alhamdulillah dalam 3 tahun ini sudah bagus. kalau dari SD Kubu Kandang sampai ke Desa Kuap itu baru tahun 2022 ini di perbaiki."⁴⁷

⁴⁶ Wawancara bersama Bapak Sohibor Redo selaku Kabid Bina Marga, 10 Mei 2023

⁴⁷ Wawancara bersama Ibu Aida selaku masyarakat Desa Kubu Kandang, 16 Mei 2023

Gambar 5

Kondisi Jalan kabupaten di Desa Kubu Kandang



Sumber : Dokumentasi Penulis

Selanjutnya wawancara bersama Abang Ridho Maulana selaku motivator tangguh Kecamatan Pelayung dan salah satu masyarakat Desa Kuap mengatakan bahwa:

"Sebelumnya perbaikan jalan di desa ini pada tahun 1997, semenjak kepemimpinan Bapak Fadhil baru ada perbaikan di tahun 2022 lalu. Pemerintah Desa ngajuin proposal dari tahun 2020 sampai 2021 sudah di ACC tapi karena anggaran tidak ada akhirnya Bapak Bupati melakukan tindakan ngambil dana pinjaman melalui APBN dan Alhamdulillah sudah terealisasikan."⁴⁸

Gambar 6

Kondisi Jalan Kabupaten di Desa Kuap



Sumber : Dokumentasi Penulis

⁴⁸ Wawancara bersama Abang Ridho Maulana selaku Motivator Tangguh Kecamatan Pelayung dan masyarakat Desa Kuap, 17 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat Desa Kubu Kandang dan Kuap, dapat disimpulkan bahwa respons masyarakat sangat bersyukur dengan adanya perbaikan jalan kabupaten di desa mereka. Ruas jalan Kabupaten dari Simpang Kubu Kandang sampai Desa Kuap sudah dalam kategori mantap, namun untuk ruas jalan kabupaten dari Desa Senaning sampai Lubuk Ruso masih bertahap. Wawancara bersama Bapak Yatin salah satu masyarakat Desa Senaning mengatakan bahwa:

"Untuk saat ini kondisi jalan kabupaten di Desa kami bagus alhamdulillah sudah di perbaiki, 70 persen sudah mantap sisanya 30 persen itu masih bertahap."⁴⁹

Gambar 7

Kondisi Jalan Kabupaten di Desa Senaning



Sumber : Dokumentasi Penulis

Kemudian wawancara bersama Bapak Saifuddin selaku masyarakat Desa Lubuk Ruso mengatakan bahwa:

"Kondisi jalan sangat memprihatikan dan untuk sementara ini belum ada perbaikan. Memang kondisi jalan ini sudah lama, terakhir di perbaiki itu sekitar tahun 2007 jadi sudah masanya rusak dan juga jalan ini di tempuh oleh mobil angkutan seperti batu kerikil dan hasil perkebunan. Kita sudah

⁴⁹ Wawancara bersama Bapak Yatin selaku masyarakat Desa Senaning, 18 Mei 2023

melakukan gotong royong penimbunan secara manual pakai batu kerikil, terus tanah timbunan mungkin ada beberapa kemarin pakai alat berat dan berkurang juga lobang nya. Tapi sekarang terkena air hujan terus musim panas jadi berlubang lagi."⁵⁰

Gambar 8

Kondisi Jalan Kabupaten di Desa Lubuk Ruso



Sumber : Dokumentasi Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Senaning dan Lubuk Ruso, penulis menyimpulkan bahwa kondisi jalan di ruas jalan tersebut masih dalam kategori tidak mantap karena perbaikannya masih bertahap. Masyarakat berharap perbaikan pada ruas jalan tersebut bisa segera di perbaiki keseluruhannya, dan pemerintah juga harus cepat tanggap untuk menangani kerusakan jalan. Sehingga dengan adanya perbaikan jalan tersebut dapat mempermudah akses masyarakat, karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari yang dapat dicermati untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan

⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Saifuddin selaku masyarakat Desa Lubuk Ruso, 18 Mei 2023

menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang akan direncanakan. Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dalam perbaikan infrastruktur jalan antara lain adalah faktor ekonomi, pertanian, serta administrasi dan keuangan. Di lain pihak faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam perbaikan infrastruktur jalan antara lain adalah undang-undang otonomi khusus dan kondisi alam.

Strengths atau kekuatan adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah yang merupakan keunggulan komparatif sebagai faktor pendorong berkembangnya masyarakat di daerah tersebut. Yang menjadi kekuatannya yaitu merupakan jalan penghubung 4 desa di Kecamatan Pelayung dan akses terdekat pembawa hasil pertanian masyarakat. Weaknesses adalah kelemahan atau keterbatasan kemampuan suatu daerah yang merintanginya untuk berkompetisi atau berkembang. Yang menjadi kelemahannya yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga jalan dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah.

Opportunities atau peluang adalah kondisi yang menguntungkan bagi suatu masyarakat untuk berkembang. Yang menjadi peluangnya yaitu sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan jalan, bekerjasama dengan pihak swasta dan bekerjasama dengan pihak BMKG. Threats atau ancaman adalah kondisi yang tidak menguntungkan dan merupakan ancaman bagi kelangsungan masyarakat suatu daerah. Yang menjadi ancamannya yaitu kondisi alam di musim hujan tidak mendukung kegiatan perbaikan jalan, masih adanya mobil angkutan

barang yang melebihi tonase dan keterlambatan sarana pembawa hasil dari pertanian.

Dari analisis SWOT tersebut, pemerintah daerah selanjutnya dapat mengkonsolidasikan faktor-faktor strategis eksternal (peluang dan ancaman) serta faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) untuk menentukan posisi strategis suatu daerah. Dengan mengetahui posisi strategis daerah berdasarkan analisis tersebut, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan ketepatan cara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai strategi tersendiri untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari yaitu:

1. Menambah Anggaran Melalui Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sohibor Redo selaku Kabid Bina Marga Mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan rekonstruksi, rehabilitasi, dan

pembangunan jalan melalui dana APBD, DAK, dan Pinjaman Daerah. Dana pinjaman daerah ini dipakai untuk membangun infrastruktur dengan rincian pembangunan jalan sebesar Rp184.000.000.000,00. Seperti yang kita ketahui masyarakat Batanghari sekitar 80 persen adalah petani, sehingga nantinya mereka dapat lancar pergi ke lahan pertaniannya baik tanaman pangan, kebun dan kolam ikan serta bisa lancar membawa hasilnya keluar."⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur atau investasi prasarana dan sarana daerah dalam rangka pelayanan publik. Selain itu Pinjaman daerah juga dapat digunakan untuk menutup arus kas daerah. Pinjaman daerah memiliki resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, dan resiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam pengelolaan pinjaman daerah. Pinjaman daerah bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan penerusan pinjaman luar negeri.
 - b) Pemerintah Daerah lain.
 - c) Lembaga keuangan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat dan kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Lembaga keuangan bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat dan kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e) Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.
2. Membatasi mobil angkutan yang melebihi tonase

⁵¹ Wawancara bersama Bapak Sohior Redo, selaku Kabid Bina Marga, 09 Mei 2023

Muatan melebihi batas maksimal (tonase) pada kendaraan besar merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Lesti selaku Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa:

"Kita bukan melarang mobil angkutan itu melintas, tetapi membatasi tonase yang melintas karena jalan yang dibangun rata-rata mampu dilewati dengan tonase maksimal 8 tonase. Jika lebih dari itu kemampuan jalan yang ada tidak cukup menahan beban dan akan mempercepat kerusakan. Ada juga faktor lain yang membuat jalan rusak misalnya musuh aspal itu kan hujan jadi selama drainasenya masih kurang bagus itu nanti airnya akan ngalir jadi tergenang. Otomatis ketika air hujan itu turun terus ada penguapan dari matahari dan lain sebagainya akhirnya daya tekannya itu akan begitu kuat, terus dilewati sama kendaraan yang bertonase berat dalam keadaan spring jadi bisa menimbulkan lobang dan apabila tidak diperhatikan malah tambah rusak. Kemudian sudah lewat dari umur rencana, tentunya butuh waktu untuk menangani seluruh ruas jalan dalam keadaan rusak."⁵²

Kemudian berdasarkan wawancara bersama Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Senaning mengatakan bahwa::

"Kami selaku pemerintah desa akan tetap memantau kondisi jalan yang pertama dari beban angkutan kalau melebihi itu harus dikurangi itu terjadi pada penarikan kayu balok di desa ini misalnya ada orang nebang batang durian kemudian tonasenya itu sampai 12 ton itu nanti di kurangi atau di bagi dua kadang kami bagi 3, jadi kami bilang ke masyarakat tolong bebannya di kurangi karena daya tahan jalan kita ini belum bisa semaksimal mungkin untuk membawa kayu-kayu keluar. Kemudian juga pada penarikan kerikil di tengah masyarakat, jadi itu semua kami lakukan agar jalan kita tetap baik. Kita juga menghimbau kepada masyarakat di bulan baik atau hari baik untuk melakukan gotong royong kalau misal badan jalan semak maka akan bisa tergenang air dan akan meremas jalan itu."⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas penulis menyimpulkan bahwa Pembatasan tonase kendaraan harus diterapkan konsisten, diiringi dengan pemberlakuan sanksi yang tegas pula, agar kondisi jalan tidak

⁵² Wawancara bersama Ibu Lesti selaku Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, 09 Mei 2023

⁵³ Wawancara bersama Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Senaning, 18 Mei 2023

semakin rusak. Menurut pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

1. Kemanfaatan, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Keselamatan, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.
3. Keamanan dan kenyamanan, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.
4. Persatuan dan kesatuan, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.
5. Efisiensi dan efektivitas, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.
6. Keadilan, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.
7. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antar sektor, keseimbangan pertumbuhan dan

perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

8. Keterpaduan, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.
9. Kebersamaan dan kemitraan, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.
10. Berkelanjutan, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.
11. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.
12. Partisipatif, yaitu asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

3. Membuat Aplikasi Pengaduan

Saat ini akses internet mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi. Tidak hanya melalui internet, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi secara online. Seperti Kabupaten Batanghari yang, Pemerintah Daerah setempat telah menyediakan Aplikasi Terus Terang. Aplikasi Terus Terang merupakan sistem informasi pengaduan masyarakat yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengadukan masalah yang terjadi secara online. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur *login multi user*, data pengaduan, isi pengaduan dan lain sebagainya. Dalam kerusakan jalan masyarakat dapat melaporkan kondisi jalan rusak di daerahnya kepada pemerintah agar segera diperbaiki.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sohibor Redo selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa:

"Prosedur pengaduannya yaitu pengajuan proposal ke dinas PU, atau bisa juga melalui aplikasi pengaduan. Pengadaan Aplikasi tersebut dinamakan Aplikasi Terus Terang yang mana guna aplikasi tersebut bertujuan agar masyarakat khususnya dalam lingkup Kabupaten Batanghari ini bisa melaporkan perihal terkait lampu penerangan jalan, lokasi jalan berlobang serta persoalan kebersihan lingkungan."⁵⁴

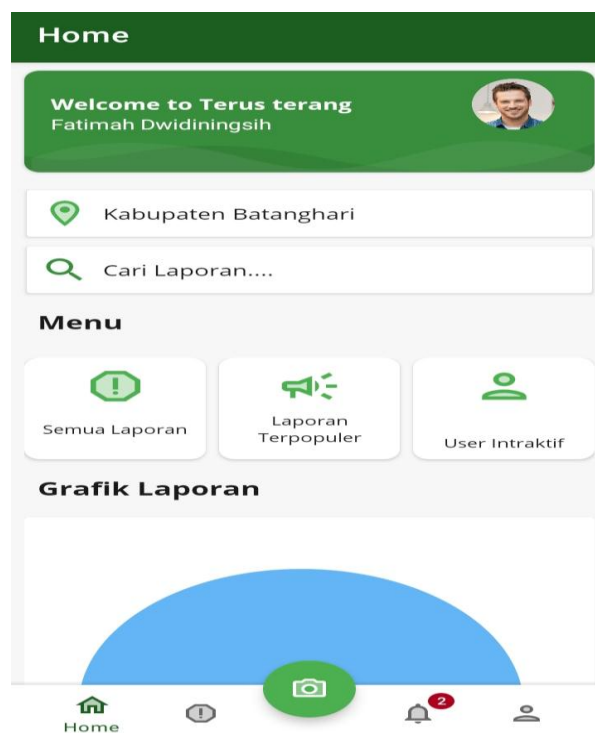
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Lesti selaku Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa:

⁵⁴ Wawancara bersama Bapak Sohibor Resi selaku Kabid Bina Marga, 10 Mei 2023

"Prosedur pengaduan nya dengan mengajukan proposal ke Dinas PU dan melalui aplikasi Terus Terang. Untuk pengaduan itu pasti kita respon tapi tidak mesti dapat, karena yang pertama kan kemungkinan ruas jalan nya bukan berada di dalam ranah nya kita, yang kedua biasanya tidak langsung segera karena kita harus melihat prioritas-prioritas jalan yang lain karena kita kan sudah dapat ada survei kondisi jalan setiap tahun nya."⁵⁵

Gambar 9

Tampilan Awal Aplikasi Terus Terang



Sumber : Kantor Dinas PUPR Kabupaten Batanghari

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya laporan dari setiap masyarakat sesuai apa yang disampaikan di aplikasi pengaduan itu, maka masyarakat sudah membantu bersinergi dengan pihak pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menetralkan permasalahan di setiap daerah. Namun sebelum melaporkan kerusakan jalan masyarakat harus tau mengenai status jalan tersebut, karena kewenangan

⁵⁵ Wawancara bersama Ibu Lesti selaku Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, 09 Mei 2023

penanganan kerusakan jalan disesuaikan dengan status jalan tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 sebelum melapor, penting untuk mengetahui status jalan di Indonesia agar laporan ditujukan pada pihak yang tepat.

Dalam suatu wilayah tanggung jawab perawatan dan perbaikan jalan berbeda-beda. Berdasarkan wawancara bersama bapak Sohibor Redo, S.H selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa:

"Kalau yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan itu seluruh masyarakat ya, tapi kalau misalnya yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan selama itu masih di dalam ruas jalan kabupaten itu tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari."⁵⁶

Kemudian wawancara bersama Bapak Alzumardani selaku Kepala Desa Kuap mengatakan bahwa:

"Yang bertanggung jawab penuh itu masyarakat bukan pemerintah, jadi kita selaku pengguna yang dibangun pemerintah kita harus berterimakasih kepada pemerintah itu kewajiban kita, saya sebagai kepala desa selalu menghimbau kepada masyarakat untuk memperbaiki jalan apabila ada jalan kita yang rusak dikit harus cepat di perbaiki seperti di timbun atau sebagainya."⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan adalah seluruh masyarakat atau pengguna jalan, tetapi yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bahwa jalan provinsi ataupun jalan kabupaten kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi ataupun pemerintah

⁵⁶ Wawancara bersama Bapak Sohibor Redo selaku Kabid Bina Marga, 10 Mei 2023

⁵⁷ Wawancara bersama Bapak Alzumardani selaku Kepala Desa Kuap, 17 Mei 2023

kabupaten kota dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu alarm peringatan bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan rusak. Sesuai pasal 24 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 24 ayat (2) berbunyi dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan

4. Menentukan Skala Prioritas

Skala Prioritas adalah ukuran kebutuhan yang disusun dalam bentuk daftar menurut tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting dan diakhiri dengan kebutuhan yang bisa ditunda. Setelah penulis melakukan wawancara terstruktur bersama Kabid Bina Marga dan Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan maka dapat ditentukan kriteria-kriteria yang dapat mempengaruhi dasar pertimbangan untuk penentuan skala prioritas pembangunan jalan sebagai berikut:

- a. Kondisi jalan, merupakan kondisi jalan kabupaten dalam Kabupaten Batanghari.
- b. Biaya, total biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- c. Jumlah dan perkembangan penduduk, jumlah penduduk pada suatu wilayah erat hubungannya dengan daya dukung wilayah tersebut dimana pemerataan penyebarannya sangat berpengaruh pada aspek pertumbuhan ekonomi,

tingkat kesejahteraan masyarakat serta aspek pertahanan dan keamanan. Sehingga jumlah dan perkembangan penduduk dapat dijadikan suatu tolak ukur perkembangan suatu daerah. Semakin besar jumlah penduduk yang dilayani, semakin tinggi prioritasnya.

- d. Potensi ekonomi daerah, peningkatan produksi berhubungan dengan kondisi jalan, karena pengembangan akses ke pasar akan mendorong penduduk untuk memproduksi lebih banyak barang untuk dijual. Orientasi produksi lokal menuju pasar, semakin besar jumlah produksi yang dapat dijual seharusnya semakin tinggi prioritas untuk pengembangan jalan.
- e. Tingkat Kepentingan, pengembangan sistem transportasi merupakan bagian dari pengembangan wilayah yang berfungsi untuk menjembatani keterkaitan fungsional kegiatan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Batanghari. Semakin besar daerah yang terpengaruh, semakin tinggi prioritasnya, hal ini berpengaruh terhadap jumlah fasilitas umum yang akan dilayani oleh ruas jalan tersebut. aksesibilitas (*accessibility*) suatu lahan dan faktor saling melengkapi (*complementarity*) antar penggunaan lahan akan menentukan nilai ekonomi suatu lahan. Suatu lahan dengan jangkauan transportasi yang baik mempunyai nilai ekonomi yang relatif lebih baik, karena akan mengurangi biaya perjalanan (*traveling cost*) dan waktu tempuh.

Gambar 10

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal Kinerja 2021	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase infrastruktur yang baik							
			Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Panjang Jalan kondisi Mantap x 100%) Total Panjang Jalan Kabupaten	36,14%	43%	50%	53%	55%	60%	
			Bertambahnya Jumlah Jembatan dalam Kondisi Mantap (Jembatan Beton dan Jembatan Rangka Baja)	0	1 unit	0 unit	1 unit	0 unit	1 unit	
			Persentase Luasa Layanan Areal Pemanfaatan dalam kondisi baik dan efektifnya pengembangan Daerah Irigasi (Luas Areal rencana x 100 %)	17%	8,8%	14,8%	9%	9%	12%	
			Meningkatnya Jumlah Kepala Keluarga yang terakses air minum layak	65,20 %	69,5%	71,90	75,20	78,25	80,50	
			Meningkatnya Jumlah Kepala Keluarga yang bersantiazi layak	78,35 %	88,50%	71,90%	75,20%	78,25%	80,50%	
			Meningkatnya Kualitas dan kuantitas drainase dalam Kabupaten Batang Hari	Jumlah Panjang Drainase dalam Kabupaten Batang Hari	0	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M
2.	Meningkatnya Pelayanan administrasi Pemerintahan urusan Pekerjaan umum dan tata ruang yang efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Jumlah sistem dan pengelolaan persampahan Regional di Daerah Kabupaten/Kota	0	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
			Meningkatkan ketersediaan Ruang Kota dan Ruang Terbuka yang Aman dan Nyaman sesuai dengan Peraturan Pemetaan Ruang serta Meningkatkan terbit Pembangunan Bangunan secara Administrasi dan Teknik	Persentase RTH terhadap Ketentuan Perundangan (Luas RT Publik Kawasan Perkotaan x 100 %)	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,04 %	0,05 %	0,06 %
			Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Jasa Konstruksi terampil yang bersertifikasi	0	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org

Pencana Strategis Dinas PUPR Kab. Batang Hari Tahun Anggaran 2021 – 2026 Page 58

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Batanghari

Dari strategi di atas hemat penulis dalam memperbaiki infrastruktur jalan perlu melibatkan peran pemerintah dan masyarakat, yaitu:

1. Peran Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berusaha menjaga kemantapan jalan dan mengupayakan jalan wewenang nya tetap dalam kondisi baik. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Sohior Redo selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa:

"Kalau jalan rusak menanggulangi nya ada dari 3 jenis yang pertama yaitu rehabilitasi, jalan itu kita rehab berkala setahun sekali dua tahun sekali tiga tahun sekali. Kedua rekontruksi, yaitu jalan yang sudah hancur parah kita bangun lagi dari awal sampai kondisi nya mantap. Kalau rehabilitasi itu kita memelihara jalan yang titik-titik rusak. Yang ketiga terus-menerus, nah ini belum bisa dilaksanakan dikarenakan biaya Kabupaten Batanghari dan dana untuk perbaikan jalan itu tidak mencukupi."⁵⁸

⁵⁸ Wawancara bersama Bapak Sohior Resi selaku Kabid Bina Marga, 10 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan yaitu rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemeliharaan rutin secara terus-menerus. Namun untuk pemeliharaan rutin secara terus-menerus belum bisa terealisasi dikarenakan dana yang tidak memadai.

2. Peran Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna jalan juga dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga jalan agar tetap baik, wawancara bersama Abang Ridho Maulana selaku Motivator Tangguh Kecamatan Pelayung dan masyarakat Desa Kuap mengatakan bahwa:

"Alhamdulillah kemarin itu saya terlibat selaku pengawasan untuk pengerasan jalan, masyarakat lain juga ikut membantu pengawasan mulai dari penjagaan apabila ada barang-barang seperti besi dan sebagainya yang di titipkan di pinggir-pinggir jalan masyarakat menjaga biar tidak hilang. Kemudian ketika pengerasan itu jelas banyak hewan-hewan liar kayak kambing, sapi, kucing dan lainnya nah itu kalau dibiarkan nanti mengganggu proses pembangunan jalan. Karena disini kan beton alhamdulillah masyarakat ikut membantu dan juga ada beberapa masyarakat yang langsung di ajak sama Dinas PU untuk sebagai penjaga pengawas jalan pengaturan lalu lintas ada juga sebagai ceker yang langsung di minta Dinas PU kepada perusahaan terkait yang membangun jalan di ajak sebagai pekerja langsung disitu."⁵⁹

Berikut pula yang dikemukakan Ibu Fitriani selaku masyarakat Desa Kubu Kandang, menyebutkan bahwa:

"Kami dari masyarakat pada bulan baik dan hari baik selalu melakukan gotong royong penimbunan secara manual pakai batu kerikil, dan tanah timbunan."⁶⁰

⁵⁹ Wawancara bersama Abang Ridho Maulana selaku Motivator Tangguh Kecamatan Pelayung dan masyarakat Desa Kuap, 17 Mei 2023

⁶⁰ Wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku masyarakat Desa Lubuk Ruso, 16 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, penulis menyimpulkan bahwa peran masyarakat dalam perbaikan jalan yaitu masyarakat ikut memberikan saran, informasi, laporan tentang kerusakan jalan, pengawasan pekerjaan jalan, atau masyarakat ikut dalam perbaikan dan pembangunan jalan secara langsung. Mengingat anggaran pemerintah Kabupaten Batanghari sangat terbatas, maka peran masyarakat sebagai pengguna jalan yang paling penting adalah masyarakat dapat bersikap tertib dan teratur dalam menggunakan jalan sehingga dapat meminimalisir kerusakan jalan di Kabupaten Batanghari, seperti tidak menggunakan jalan untuk kegiatan yang tidak sesuai, menggunakan kendaraan yang sesuai dengan kelas jalan, tidak membawa muatan yang melebihi tonase terhadap kapasitas jalan dan sebagainya.

B. Tantangan dan Peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Batanghari

Adapun tantangan dan peluang dalam perbaikan infrastruktur jalan kabupaten di Kabupaten Batanghari oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran

Salah satu faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya perbaikan adalah masalah dana. Wawancara bersama Kabid Bina Marga, Bapak Sohibor Redo mengatakan bahwa:

"Membangun jalan atau memperbaiki jalan tentunya butuh dana, sejauh ini kendala yang pemerintah hadapi adalah kemampuan anggaran pengelolaan jalan yang terbatas, apalagi kadang kerusakan jalan di luar prediksi dan perencanaan anggaran."⁶¹

⁶¹ Wawancara bersama Bapak Sohibor Redo selaku Kabid Bina Marga, 10 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari adalah tidak adanya anggaran. Mengingat kerusakan yang cukup banyak terjadi di berbagai ruas jalan di Kabupaten Batanghari, Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum bisa melakukan perbaikan secara keseluruhan namun berusaha memperbaiki jalan rusak tersebut secara bertahap.

2. Cuaca yang tidak menentu

Cuaca yang tidak menentu turut menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari. Wawancara bersama Kabid Bina Marga, Bapak Sohibor Redo mengatakan bahwa:

"Perbaikan jalan rusak tidak akan berjalan maksimal karena faktor cuaca, kalau kegiatan perbaikan jalan dilaksanakan dalam kondisi buruk atau sering hujan maka kurang efektif dan umur jalan nanti tidak akan panjang."⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perbaikan jalan rusak di Kabupaten Batanghari tidak akan berjalan maksimal karena faktor cuaca. Seperti perbaikan jalan di ruas jalan Simpang Kubu Kandang sampai Desa Lubuk Ruso pada bulan September sampai November terkendala hujan. Merujuk pada teori bahwa indikasi implementasi pembangunan kurang tepat sehingga jika pelaksanaan tetap dilakukan pada saat hujan atau standar suhu dingin nanti akan cepat rusak karena tidak sesuai spesifikasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari perlu memperkuat tenaga sumber daya manusia

⁶² Wawancara bersama Bapak Sohibor Redo selaku Kabid Bina Marga, 10 Mei 2023

(SDM) sebagai langkah mitigasi agar fokus pemerintah dalam membangun jalan bisa terlaksana dengan baik.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Tanpa adanya rasa tanggungjawab pengguna jalan maka manfaat dari jalan tersebut tidak akan optimal. Wawancara bersama Kabid Bina Marga, Bapak Sohibor Redo mengatakan bahwa:

"Sebagai pengguna jalan kita harus memelihara fasilitas-fasilitas umum yang ada disekitar kita agar fungsi dan manfaat dari fasilitas-fasilitas tersebut bisa dinikmati dalam jangka panjang."⁶³

Berikut respon dari masyarakat mengenai kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga jalan agar tetap baik, wawancara dengan Ibu Yusmala selaku masyarakat Desa Kuap mengatakan bahwa:

"Dengan melihat keadaan jalan yang sekarang ini nanti kalau mobil bawak yang berat-berat itu tidak boleh lewat seperti batu bara, misalnya kemaren itu lah mulai ada yang berani bawak mobil batu bara masuk tapi itu sudah di tegur oleh Kades kami, kalau mobil kosong tidak jadi masalah tapi kalau mobil itu bawak muatan itu takut jalan nya rusak."⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa harus ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada, agar fungsi dan manfaat dari jalan tersebut bisa dinikmati secara terus-menerus. Jika jalan rusak belum tertangani dengan cepat, sebaiknya kita sebagai masyarakat pengguna jalan harus ikut ambil andil membantu mengurangi dampak dari kerusakan jalan tersebut. Seperti melakukan penimbunan jalan yang berlubang dengan material di sekitar kita seperti, dengan pasir, tanah,

⁶³ Wawancara bersama Bapak Sohibor Redo selaku Kabid Bina Marga, 10 Mei 2023

⁶⁴ Wawancara bersama Ibu Yusmala selaku masyarakat Desa Kuap, 17 Mei 2023

kerikil atau material apapun yang dapat meminimalisir dampak dari kerusakan jalan yang berlubang.

Suatu tantangan memang akan selalu sejalan dengan sebuah peluang, peluang adalah nilai kuantitas untuk menyatakan seberapa besar terjadinya suatu peristiwa. Adapun peluang dari perbaikan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Batanghari sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan pihak swasta

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Dengan demikian banyak terjadi keterlambatan dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan *Non Governmental Organisation* (NGO), serta dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan skill SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta ini dikenal dengan *public private partnership* (PPP).

2. Bekerjasama dengan pihak BMKG

Pemerintah Kabupaten Batanghari harus memperdalam kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Karena BMKG mempunyai kemampuan dalam bidang prakiraan cuaca dan prediksi kemungkinan terjadinya bencana, yang bermanfaat dalam pembangunan infrastruktur tangguh bencana.

3. Sosialisasi dengan masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan jalan

Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan jalan akan memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pembangunan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, memberikan pelayanan di bidang infrastruktur dan penataan ruang, serta tertib administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai perbaikan jalan di Kabupaten Batanghari, dengan melihat bagaimana strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam perbaikan jalan. Dan apa saja tantangan dan peluang dalam perbaikan jalan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi perbaikan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari yaitu menambah anggaran melalui pinjaman daerah, membatasi mobil yang melebihi tonase, membuat aplikasi pengaduan, dan menentukan skala prioritas.
2. Tantangan dalam perbaikan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari yaitu, keterbatasan anggaran, cuaca yang tidak menentu dan kurangnya kesadaran masyarakat. Adapun peluang dari perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari yaitu bekerjasama dengan pihak swasta, bekerjasama dengan pihak BMKG, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan jalan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus cepat tanggap untuk menangani kerusakan jalan atau dalam hal tersebut belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, pemerintah harus memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kerusakan lingkungan.
2. Pemerintah harus melakukan perawatan dan pemeliharaan jalan yang rutin di daerah terpencil agar jalan dapat bertahan dalam waktu lama. Jalan di daerah terpencil seringkali lebih rentan terhadap kerusakan akibat cuaca dan lingkungan, sehingga perawatan dan pemeliharaan yang rutin perlu dilakukan untuk menjaga kualitas jalan. Hal ini juga dapat menghindari biaya perbaikan yang lebih besar di masa depan.
3. Bagi masyarakat sebagai pengguna jalan harus berpartisipasi dalam menjaga dan merawat jalan untuk membantu mengurangi dampak dari kerusakan jalan tersebut. Seperti melakukan penimbunan jalan yang berlubang dengan material yang ada di sekitar, sehingga manfaat dan fungsi dari jalan tersebut bisa dinikmati secara terus-menerus.
4. Bagi masyarakat agar menghimbau dan menegur apabila ada mobil angkutan yang melebihi tonase melewati jalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Amri Amir, *Ekonomi Pembangunan Islam*, WIDA Publishing, 2021
- Bonaraja Purba, dkk, *Ekonomi Pembangunan*, Yayasan Kita Menulis, 2021
- Daryanto, Arif, dan Yundy Hafizrianda, *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*, PT Penerbit IPB Press, 2018
- Djamin, Zulkarnain, *Struktur Perekonomian dan Strategi Pembangunan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, 1995
- Hanif Nurcholis, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, Grasindo, 2009
- Ignatius adiwidjaja, *Politik Bernegara*, Zahir Publishing, 2017
- Irwan, dkk, *Pendekatan Partisipatif: Implementasi Perencanaan Pembangunan*, Media Sains Indonesia, 2021
- Iskandar kato, Ahmad Faridi, Erika Revida, Darwin Damanik, dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Yayasan Kita Menulis, 2021
- Kuncoro, Mudrajad, *Perencanaan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Limega Candrasa, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, PT Inovasi Pratama Internasional, 2022
- M. Syahri Thohir, *Hukum Pembangunan: Reformasi Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Kebijakan dan Pelayanan Publik*, CV Budi Utama, 2019
- Patta Rapanna dan Yana Fajriah, *Menembus Badai Ekonomi*, SAH Media, 2018
- Randy R Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Elex Media Komputindo, 2006

- Samsul Ramli, Muhammad Ide Ambardi, *Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visi Media, 2016
- Sayuti Una, *Pedoman Panduan Skripsi*, Jambi: Syariah Press, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2006
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syariah Press, 2020
- Triton, *Marketing Strategic*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008
- Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

B. Jurnal dan Penelitian

- Adiwidjaja, I., N. Bagus, dan S. Slaman, *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Instansi Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2022
- Fatimah, S Adys A K, dan Rahim S, Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, Vol. 2. No. 4, 2021
- Gultom, Rifyal Zuhdi, Annisa Qadarusman Tini, "Pembangunan infrastruktur dalam Islam: Tinjauan ekonomi dan sosial", *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6. No. 2, 2020

- Hevina, Nopriza, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (studi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022
- Kristiawan, P. R., Dewi, D. A. S., dan Suharso S, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang), *Borobudur Law Review*, Vol. 2. No. 1, 2020
- Kurniawan, Amira, *Peran Kepala Daerah dalam Perbaikan Infrastruktur*
- Nurpazilah, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Jalan di Kabupaten ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 (Studi Kasus Jalan Kabupaten Sarolangun di Kecamatan Limun Provinsi Jambi)*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022
- Ratna Santika, Hj. Aji Ratna Kusuma, dan Haryono Susilo Utomo, *Studi Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*, Universitas Mulawarman, 2019
- Rizki Aryanda, *Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Alokasi Dana Desa Di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Warsilan W,& Noor A, Peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan pembangunan di kota samarinda, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 31. No. 2, 2015

C. Sumber-sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik, <https://batanghari.bps.go.id> diakses pada 28 Desember 2022

Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 303 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batang Hari Observasi awal, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari, 6 Desember 2022

Pemerintah kabupaten Batanghari, <https://batangharikab.go.id/> diakses pada 29 Juni 2022


Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 38 tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Penataan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PUPR Kabupaten Batanghari, <https://pupr.batangharikab.go.id> diakses pada 24 Februari 2023

Redaktur 1, Jelang Dua Tahun Kepemimpinannya Bupati Batanghari Genjot pembangunan Jalan, <https://koranpelita.co/2023/01/02> diakses pada 24 Februari 2023

Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lampiran 1 Surat izin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2494/D.II.1/PP.00.11/4/2023 Jambi, 10 April 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penata Ruang Kab. Batanghari
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **Fatimah Dwidiningsih**
NIM : 105190183
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Batanghari
Waktu Penelitian : 10 April 2023 – 10 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, S.K.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

No. 10 April 2023

Lampiran 2 Daftar Informan

No	Informan	Jabatan
1	Sohibor Redo, S.H	Kabid Bina Marga
2	Lesti, S.T	Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
3	Safta Hadi Wijaya	Sekretaris Desa Kubu Kandang
4	Alzumardani	Kepala Desa Kuap
5	Kusnadi	Kepala Desa Senaning
6	Wildan	Sekretaris Desa Lubuk Ruso
7	Ridho Maulana, S.Si	Motivator Tangguh Kecamatan Pelayung/ Masyarakat Desa Kuap
8	Yusmala	Masyarakat Desa Kuap
9	Fitriani	Masyarakat Desa Kubu Kandang
10	Rita	Masyarakat Desa Kubu Kandang
11	Aida	Masyarakat Desa Kubu Kandang
12	Zainul Bakri	Masyarakat Desa Senaning
13	Yatin	Masyarakat Desa Senaning
14	Zulkifli	Masyarakat Desa Lubuk Ruso
15	Saifuddin	Masyarakat Desa Lubuk Ruso

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari

1. Bagaimana kondisi infrastruktur Jalan kabupaten di Kabupaten Batanghari?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab kerusakan infrastruktur jalan tersebut?
3. Siapa yang bertanggung Jawab atas kerusakan jalan kabupaten di Kabupaten Batanghari?
4. Bagaimana prosedur pengaduan keluhan mengenai kerusakan infrastruktur jalan?
5. Bagaimana jika masyarakat atau pengguna jalan sudah menyampaikan informasi terkait kerusakan jalan, namun tidak mendapat respons?
6. Bagaimana strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari dalam perbaikan infrastruktur jalan kabupaten?
7. Bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggulangi rusaknya jalan kabupaten di Kabupaten Batanghari?
8. Apa saja tantangan dan peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batanghari dalam perbaikan infrastruktur jalan Kabupaten?
9. Dalam hal penyelenggaraan belum melakukan perbaikan jalan yang rusak apa yang harus dilakukan?

Pertanyaan untuk Pemerintah Desa

1. Bagaimana kondisi infrastruktur jalan kabupaten di desa ini?

2. Apakah sebelumnya sudah ada perbaikan infrastruktur jalan kabupaten di desa ini?
3. Apa penyebab jalan kabupaten rusak di desa ini?
4. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan kabupaten di desa ini?
5. Bagaimana prosedur pengaduan keluhan mengenai kerusakan infrastruktur jalan di desa ini?
6. Bagaimana tindakan pemerintah desa dalam menanggulangi rusaknya jalan kabupaten di desa ini?
7. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menjaga jalan agar tetap baik?

Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan masyarakat melihat kondisi infrastruktur jalan kabupaten di desa ini?
2. Apakah yang akan masyarakat lakukan jika melihat ada jalan yang rusak?
3. Apakah sebelumnya sudah ada perbaikan infrastruktur jalan kabupaten di desa ini?
4. Apakah ada pengaruh dari perbaikan infrastruktur jalan untuk masyarakat di desa ini?
5. Bagaimana upaya masyarakat dalam menjaga jalan agar tetap baik?
6. Apa harapan masyarakat mengenai perbaikan infrastruktur jalan kabupaten di desa ini?

Lampiran 4 Dokumentasi Riset



Dokumentasi bersama Bapak Kabid Bina Marga



Dokumentasi Bersama Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan



Dokumentasi Bersama Sekretaris Desa Kubu Kandang



Dokumentasi bersama Kepala Desa Kuap



Dokumentasi bersama Sekretaris Desa Lubuk Ruso



Dokumentasi bersama Kepala Desa Senaning

Dokumentasi bersama masyarakat Desa Kubu Kandang



Dokumentasi bersama masyarakat Desa Kuap



Dokumentasi bersama masyarakat Desa Senaning



Dokumentasi bersama masyarakat Desa Lubuk Ruso



Lampiran 5 Dokumen Pendukung Laporan Riset

Surat Keterangan Bukti Riset

 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan Sultan Thaha Muara Bulan Kode Pos (36613)
Telp.(0743) 21041-21065
Email : dirwpu@batangharikab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor :800 /437 /Sub-Umum/DPJTR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari, menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : H.KAMAL EFFENDI,SH
Nip : 197111062000031003
Pangkat Gol/Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Plt Kepala Dinas
Alamat : Jalan Sulthan Thaha Muara Bulan

Menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : FATIMAH DWIDININGSIH
Tempat Tanggal Lahir : Serasah,11 Juli 2001
NIM : 105190183
Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Alamat : RT.01 Desa Serasah

Dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut telah melakukan riset dan penelitian tentang " Penerapan Electronic Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari dari tanggal 10 April 2023 s/d 23 Juni 2023.

Demikianlah surat keterangan ini,semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Foto Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Batanghari



Motto dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Tahun 2022



SOP Dinas PUPR Kabupaten Batanghari

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf pemeliharaan jalan	Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kepala Bidang Bina Marga	Kepala DPUPR	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventarisir kerusakan jalan					Data survey kerusakan jalan dan atau laporan permohonan perbaikan jalan dari masyarakat	1 hari	Data kerusakan jalan	Jika laporan perbaikan berupa surat permohonan, maka surat akan masuk ke agenda
2	Menentukan skala prioritas perbaikan jalan dan mengajukan ke Kepala DPUPR					Data kerusakan jalan	10 menit	Rasa jalan yang akan diperbaiki	
3	Menyetujui/menolak jalan yang akan diperbaiki					Rasa jalan yang akan diperbaiki	1 hari	Perintah pelaksanaan atau pelaksanaan perbaikan jalan	
4	Mengarahkan Sub Koordinator Jalan dan Jembatan untuk melakukan perbaikan jalan					Perintah pelaksanaan perbaikan jalan	5 menit	Arahan pelaksanaan perbaikan jalan	
5	Mengarahkan Staf Pemeliharaan Jalan untuk persiapan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan					Arahan pelaksanaan perbaikan jalan	10 menit	Persiapan pelaksanaan perbaikan jalan	
6	Menghitung kebutuhan material yang digunakan, mengajukan permohonan pemakaian aspal, membuat dan mengolah agregat hotmix sesuai takaran dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan					Persiapan pelaksanaan perbaikan jalan, perhitungan kebutuhan material dan peralatan perbaikan jalan	1-7 hari	Pelaksanaan perbaikan jalan	Lama waktu perbaikan tergantung jenis penanganan dan kondisi kerusakan jalan
7	Menerima laporan hasil pekerjaan perbaikan jalan					Pelaksanaan Perbaikan jalan	15 menit	Laporan hasil pekerjaan perbaikan jalan	Laporan digunakan

Renstra Dinas PUPR Kabupaten Batanghari Tahun 2021-2026

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENCAPAIAN INDIKATOR RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021 S/D 2026

Tipe	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Kategori	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kegiatan												Keterangan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Strategis	Kelembagaan	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Kelembagaan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
							target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	
Strategis	Kelembagaan	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Kelembagaan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
							target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	
Operasional	Kelembagaan	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Kelembagaan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
							target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	target	Rp/1000	

Rencana Strategis Dinas PUPR Kab. Batang Hari Tahun Anggaran 2021 – 2026 Page 69

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Fatimah Dwidiningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Serasah, 11 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
No. Telp/Hp : 08877248009
Email : fatimahdwidiningsih@gmail.com
Alamat : Jl. Jambi-Muara Bulian km 33 RT 01 Desa
Serasah, Kecamatan Pelayung, Batanghari
Nama Ayah : Suparman
Nama Ibu : Windarti

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 82/1 DESA SERASAH
SMP/MTS : SMPN 17 BATANGHARI
SMA/MA : SMAN 8 BATANGHARI